



# RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR





# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

**Pasal 2**

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
  - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
  - BAB V. Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Signature]*  
SUFARMI

NIP. 19690312 198903 2 009

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Peran pemerintah bersifat stimulus atau pengungkit khususnya dalam rangka revitalisasi pertanian untuk mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan, sehingga perkembangan peternakan tidak terlepas dari peran serta masyarakat peternakan sebagai pelaku usaha. Untuk itu diperlukan rencana kerja yang sinergi dan difasilitasi oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur, terutama dalam upaya kecukupan daging dan penyediaan komoditas peternakan lainnya, pemberdayaan ekonomi pedesaan serta memanfaatkan peluang pasar komoditas peternakan.

Samarinda, Juli 2024

Kepala Dinas,



**Fahri Himawan, S.T., M.T**

Prabina Utama Muda

19741216 200604 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	6
2.2 Gambaran Tupoksi dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	24
2.2.1 Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	24
2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	25
2.2.3 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah .....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	32
2.3.1 Permasalahan .....	32
2.3.2 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	45
2.3.3 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat .....	46
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan .....	59
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	60
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	82
BAB III .....	83
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	83
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	83
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	85
3.2.1 Tujuan .....	85

3.2.2 Sasaran Renja.....	86
3.3 Program dan Kegiatan .....	86
3.3.1 Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan .....	86
3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan .....	87
BAB IV .....	94
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	94
BAB IV .....	117
P E N U T U P .....	117
LAMPIRAN 2. ....	93
Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota.....	93
KEPUTUSAN .....	0

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.....	6
Tabel 2 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2013 s/d 202223	
Tabel 3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2023 .....	27
Tabel 4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 .....	27
Tabel 5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2023 .....	28
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2022.....	29
Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	31
Tabel 8 Pengadaan Ternak Tahun 2013-2022 .....	31
Tabel 9 Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton).....	51
Tabel 10 Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton).....	54
Tabel 11 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton) .....	54
Tabel 12 <i>Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN</i> .....	55
Tabel 13 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022...	56
Tabel 14 Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 .....	59
Tabel 15 Review Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024.....	61
Tabel 16 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	82
Tabel 17 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	85
Tabel 18 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .....	86
Table 19 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesheatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	95

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode 2024-2026 yang memuat rancangan awal kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahun 2025 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Rencana Kerja yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- b. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari misi, tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan perenagkat daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025
- d. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan rencana kerja hingga penetapan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran output dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang – bidang di rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Renja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025

### 1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan

Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				K	Rp			K
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur				158,664,134,300						66,530,363,013		64,596,998,622		97.09		
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	82	%	104,674,727,782	81.00	81.00	100.00	82.00	35,256,609,843	85.54	34,420,705,570	104	98	86	104
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79.30	Nilai	4,673,100,000	79.20	77.60	97.98	79.30	1,774,428,900	75.60	1,687,423,816	95	95	76	95
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.00	%	57,123,915,293	80.00	83.37	104.21	80.00	17,091,370,223	80.00	16,661,786,119	100	97	80	100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.00	%	2,265,210,000	80.00	79.92	99.90	80.00	630,247,300	80.00	568,556,511	100	90	80	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					K	Rp		
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.00	%	8,881,963,318	80.00	83.54	104.43	80.00	3,489,111,800	80.00	3,688,029,384	100	106	80	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.00	%	8,819,421,720	80.00	85.05	106.31	80.00	1,467,430,000	80.00	1,428,972,700	100	97	80	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.00	%	14,273,815,877	80.00	86.36	107.95	80.00	7,585,844,380	71.00	7,471,178,615	89	98	71	89
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.00	%	8,637,301,574	80.00	82.42	103.03	80.00	3,218,177,240	80.00	2,914,758,425	100	91	80	100
												99	97		99	
												ST	ST		ST	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	22	%	29,009,748,518	21	21	100	22.00	14,122,035,310	22.06	13,834,784,894	100	98	22.06	100
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	151	Unit usaha	2,496,000,000	75	75	0	76.00	1,601,789,140	76.00	1,536,249,216	100	96	151	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)								
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi Ternak Sapi Bibit	155	Ekor	3,462,106,264	65	65	100	80.00	1,451,314,670	86.00	1,411,888,124	108	97	151	97
		Produksi HPT (Segar)	2,375	Ton		800	896	112	825.00		1072.00		130		2375	100
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	16.50	Bulan	6,452,630,000	17	17	100	16.50	2,628,917,200	15.95	2,531,121,346	103	96	15.95	97
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	120	Sampel	3,642,305,500	40	40	100	40.00	573,592,000	40.00	568,588,387	100	99	120	100
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	32	sampel	1,867,087,500	11	16	145	13.00	309,090,500	13.00	616,760,798	100	200	32	100
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah kelompok penerima ternak	30	Kelompok	11,089,619,254	12	4	33	43.00	7,557,331,800	43.00	7,170,177,023	100	95	30	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					K	Rp		
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Daerah Provinsi Lain															
													120	112		113
													ST	T		T
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	120	Unit	7,109,518,000	49	49	100	30.00	5,309,353,900	30.00	5,288,661,726	100	100	96	80
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	120	Unit	24,608,875,700	49	49	100	30.00	5,309,353,900	30.00	5,288,661,726	100	100	120	100
													100	100		90
													ST	ST		S
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	70	%	11,501,140,000	60	60	100	70.00	10,003,799,160	70.00	9,252,051,634	100	92	70	100
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	14	%		13	13	100	14.00		14.28		102		14	100
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10	Kab/Kota	2,081,100,000	10	10	100	10.00	1,448,521,000	10.00	1,412,061,640	100	97	10	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					K	Rp		
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp		K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
	Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	3	Check Point	2,623,340,000	2	2	100	3.00	4,171,771,500	3.00	3,589,834,129	100	86	3	100
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15	%	4,394,650,000	14	14	100	15.00	3,151,248,860	15.00	3,020,547,010	100	96	15	100
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	6	Unit Usaha	1,092,150,000	2	2	100	2.00	524,664,000	2.00	523,502,756	100	100	6	100
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	23	Unit Usaha	1,309,900,000	5	5	100	11.00	707,593,800	11.00	706,106,099	100	100	23	100
													100	95		ST
													ST	T		T
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	75	%	2,389,800,000	50	50	100	75.00	753,162,100	75.00	735,784,675	100	98	75	100

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)					K	Rp		
1	2	3	4			6	7	8 = (7/6)	9		10.00		11 = 10/9*100		12	13 = 12/4
			K	Rp	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	90	Unit usaha	1,599,500,000	30	30	100	35.00	544,416,000	35.00	527,189,090	100	97	90	100
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecur (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecur obat hewan	4	Rekomendasi	790,300,000	1	1	100	2.00	208,746,100	1.00	208,595,585	50	100	4	100
												83	98		100	
												ST	ST		ST	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	45	%	3,979,200,000	44	44	100	45	1,085,402,700	45.00	1,065,010,123	100	98	45	100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12	Kali	1,760,000,000	12	12	100	12	545,837,000	12.00	525,829,357	100	96	12	100
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	65	Kelompok	2,219,200,000	20	20	100	25	539,565,700	25.00	539,180,766	100	100	65	100
												100	98		100	
												ST	ST		ST	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tersebut, disampaikan hasil program/kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 28,151,959,463 dari pagu anggaran Rp 28,697,078,523 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,1%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 85,54% dari target 82%. Realisasi skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan bersumber data pelayanan klinik hewan dan pelayanan vaksinasi, pelayanan expo pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha dan peternak. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,687,423,816 dari pagu anggaran Rp 1,774,428,900 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,1%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja dengan realisasi kinerja 75,6 dari target 79,30.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 16,418,246,119 dari pagu anggaran Rp 16,847,830,223 dengan rata-rata capaian keuangan 91,4%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 503,699,444 dari pagu anggaran Rp 556,891,100 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,45%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2,731,952,727 dari pagu anggaran Rp 2,527,480,400 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 108.09%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 863,400,000 dari pagu anggaran Rp 897,090,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,24%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 4,492,152,707 dari pagu anggaran Rp 4,591,942,060 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,83%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 71% dari target 80%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,455,084,650 dari pagu anggaran Rp 1,501,415,840 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,91%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 terealisasi Rp 12,422,896,770 dari pagu anggaran Rp 13,042,871,695 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,25%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 22,06% dari target 22 % atau setara dengan 23.963 ekor. Program penyediaan dan

pengembangan sarana pertanian terdiri dari 5 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,536,249,216 dari pagu anggaran Rp 1,601,789,140 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,91%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan dengan realisasi 76 unit usaha dari target 76 unit usaha.

b. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2,531,121,346 dari pagu anggaran Rp 2,628,917,200 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,67%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah calving interval dengan realisasi indikator kinerja sebesar 16,5 bulan dari target 16,5 bulan. Calving Interval (CI) adalah jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya pada ternak betina. Jarak kelahiran (CI) merupakan salah satu ukuran produktifitas ternak sapi untuk menghasilkan pedet dalam waktu yang singkat.

c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 568,588,387 dari pagu anggaran Rp 573,592,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,13%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 40 sampel dari target 40 sampel.

d. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Kegiatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 616,760,798 dari pagu anggaran Rp 681,241,555 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,53%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah sampel obat

hewan yang memenuhi persyaratan mutu dengan realisasi indikator kinerja sebesar 13 sampel dari target 13 sampel.

e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 7,170,177,023 dari pagu anggaran Rp 7,557,331,800 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 94,88%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok penerima ternak dengan realisasi indikator kinerja 43 kelompok dari target 43 kelompok.

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 5,288,661,726 dari pagu anggaran Rp 5,309,353,900 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,61%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah jumlah miniranch yang teregister dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 30 unit dari target 30 unit. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan prasarana pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 5,288,661,726 dari pagu anggaran Rp 5,309,353,900 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,61%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah miniranch sapi potong dengan realisasi kinerja 30 unit dari target 30 unit. Lokasi mini ranch sapi potong tahun 2023 terdiri dari Kabupaten Berau 3 unit, Kutai Barat 3 unit, Kutai Kartanegara 9 unit, Kutai Timur 5 unit, Paser 5 unit, Kota Bontang 1 unit, Penajam Paser Utara 3 unit, dan Samarinda 1 unit.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV tahun 2023 terealisasi Rp 6,231,504,624 dengan pagu anggaran Rp 2.605.525.500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 90,94%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 70% dari target 70%. wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kota Balikpapan dan Samarinda
- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 14% dari target 14,28%. unit usaha yang sudah terbit sertifikasi NKV sebanyak 6 unit usaha dari target 6 unit usaha. Adapun daftar unit usaha tersebut sebagai berikut:
  1. PT Bumi Mulia Sentosa Abadi
  2. PT Matahari Putra Prima Tbk
  3. PT Laris Manis Utama
  4. Farmer Market Samarinda
  5. PT Agro Boga Utama
  6. PT. Perfect Companion Indonesia

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari lima kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,412,061,640 dari pagu anggaran Rp 1,448,521,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,48%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 10 kab/kota dari target 10 kab/kota. wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI terdiri dari Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Bontang, Samarinda.

- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp

3,589,834,129 dari pagu anggaran Rp 4,171,771,500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 86,05%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 3 checkpoint dari target 3 checkpoint. Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan yaitu check point muara komam dan batu engau di Kabupaten Paser serta Check Point di Kabupaten Kutai Barat.

c. Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 523,502,756 dari pagu anggaran Rp 524,664,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,78%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dengan realisasi kinerja sebanyak 2 unit usaha dari target 2 unit usaha. unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yaitu PT. Laris Manis Utama di Samarinda dan PT. Supra Boga Lestari Tbk. di Samarinda

d. Kesejahteraan Hewan

Kegiatan kesejahteraan hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 706,106,099 dari pagu anggaran Rp 707,593,800 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,79%. Realisasi keuangan yang besar ini dikarenakan pagu anggaran pada kegiatan tersebut mengalami kenaikan pada saat proses penganggaran. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan dengan realisasi indikator kinerja sebanyak 11 unit dari target 11 unit usaha

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program perizinan usaha pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 735,784,675 dari pagu anggaran Rp 753,162,100 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,69%. Indikator kinerja program tersebut adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha dengan realisasi kinerja sebesar 75% dari target 75%. Unit usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha terealisasi 1 unit usaha. Program perizinan usaha pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 527,189,090 dari pagu anggaran Rp 544,416,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,84%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan dengan realisasi kinerja sebanyak 35 unit usaha dari target 35 unit usaha.

b. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Kegiatan penerbitan izin usaha pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 208,595,585 dari pagu anggaran Rp 208,746,100 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,93%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan dengan realisasi kinerja sebanyak 2 rekomendasi dari target 2 rekomendasi. rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan diberikan kepada PT. Romindo Primavetcom

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,065,010,123 dari pagu anggaran Rp 1,085,402,700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 98,12%. Indikator kinerja program tersebut adalah Cakupan binaan kelompok ternak dengan realisasi sebesar 45% dari target 45%. Cakupan binaan kelompok ternak sebesar 44% setara dengan 810 kelompok yang telah dibina dari target kelompok peternak 1.798 kelompok. Program penyuluhan pertanian terdiri dari dua kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 525,829,357 dengan pagu anggaran Rp 545,837,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,33%. Indikator kegiatan tersebut adalah jumlah informasi penyebaran informasi peternakan dengan realisasi kinerja sebanyak 12 kali dari target 12 kali.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 539,180,766

dari pagu anggaran Rp 539,565,700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,93%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah jumlah kelompok ternak yang teregistrasi dengan realisasi kinerja sebanyak 25 kelompok dari target 25 kelompok.

B. UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 4,101,868,179 dari pagu anggaran Rp 4,313,986,300 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 95,08%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 85,54% dari target 82%. Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan data bersumber dari pelanggan atau masyarakat yang melakukan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 128,700,000 dari pagu anggaran Rp 128,700,000 dengan rata-rata capaian keuangan 100,00%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 52,115,168 dari pagu anggaran Rp 60,511,700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 86,12%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 576,071,648 dari pagu anggaran Rp 578,430,800 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,59%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan

pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Kegiatan d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 7,106,200 dari pagu anggaran Rp 10,928,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 65,03%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2,001,806,620 dari pagu anggaran Rp 1,946,361,100 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 102,85%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 1,336,068,543 dari pagu anggaran Rp 1,589,054,700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 94,08%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%

## 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 terealisasi Rp 1,411,888,124 dari pagu anggaran Rp 1,451,314,670 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,28%. Indikator kinerja capaian program tersebut adalah angka kelahiran sapi dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 22% dari target 22,06%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi  
 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi

Rp 1,411,888,124 dari pagu anggaran Rp 1,451,314,670 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 97,28%. Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari dua indikator yaitu:

- Indikator kinerja Populasi ternak sapi bibit sampai dengan triwulan IV 86 ekor dari target 80 ekor
- Indikator kinerja produksi HPT segar sampai dengan triwulan IV 1072 Ton dari target 825 ton/tahun

C. UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 2,166,877,928 dari pagu anggaran Rp 2,245,545,020 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,12%. Indikator kinerja program tersebut adalah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 85,54% dari target 82%. Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan data bersumber dari pelanggan atau masyarakat yang melakukan pengujian sampel baik sampel pengujian hewan dan produk hewan ke UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari tujuh kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 114,840,000 dari pagu anggaran Rp 114,840,000 dengan rata-rata capaian keuangan 100%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi keuangan dengan realisasi kinerja 80% dengan target 80%.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 12,741,899 dari pagu anggaran Rp 12,844,500 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,20%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja sebesar 80% dari target 80%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 380,005,009 dari pagu anggaran Rp 383,200,600 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,17%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

- d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 558,466,500 dari pagu anggaran Rp 559,412,000 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 99,83%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%.

- e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 977,219,288 dari pagu anggaran Rp 1,047,541,220 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 93,29%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja 80% dari target 80%

- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 102.860.037 dari pagu anggaran Rp 95.764.650 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 107,41%. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi kinerja sebesar 97,26% dari target 80%

2. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp 123,605,232 dengan pagu anggaran Rp 127,706,700 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 96,79%. Indikator kinerja program tersebut terdiri dari:

- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dengan realisasi kinerja program sebesar 70% dari target 70%. wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Samarinda.
- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) dengan realisasi kinerja program sebesar 14% dari target 14,28%. unit usaha yang sudah terbit sertifikasi NKV sebanyak 6 unit usaha dari target 6 unit usaha.

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner didukung dengan kegiatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan dengan Indikator kinerja kegiatan tersebut peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan dengan realisasi kinerja kegiatan sebesar 15% dari target kinerja 15%

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur selain bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga bersumber dari dana APBN yang berasal dari kegiatan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pengalokasian berupa Tugas Pembantuan. Dukungan anggaran APBD dan APBN sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2013 s/d 2022

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP Tugas Pembantuan (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2013	35.086.258.000 Realisasi 96,03%	72.318.668.123 Realisasi 94,53%	107.404.926.123
2.	2014	30.764.230.000 Realisasi 73,79%	67.517.958.263,50 Realisasi 94,80%	98.282.188.263,50
3.	2015	307.682.215.000 Realisasi 46,28%	80.919.778.040 Realisasi 74,52%	388.601.993.040
4.	2016	25.083.899.000 Realisasi 91,63%	59.605.749.228 Realisasi 94,59%	81.466.766.834

No.	Tahun Anggaran	APBN Ditjen PKH & PSP Tugas Pembantuan (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
5.	2017	8.332.948.000 Realisasi 90,00%	20.299.891.000 Realisasi 90,68%	28.622.839.000
6.	2018	3.413.441.000 Realisasi 94,86%	22.157.153.540,07 Realisasi 96,39%	25.570.594.540,07
7.	2019	7.156.453.000 Realisasi 96,61%	46.903.080.000 Realisasi 91,99%	54.059.533.000
8.	2020	4.133.774.000 Realisasi 95,29%	46.634.207.724 Realisasi 90,21%	50.767.981.724
9.	2021	4.708.807.000 Realisasi 97,04%	59.575.683.770 Realisasi 81,38	64.284.490.770
10.	2022	7.987.573.000 Realisasi 88%	49.294.328.927 Realisasi 91,06%	57.281.901.927

Dana APBN merupakan akumulasi Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Tahun anggaran 2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.813.650.384 termasuk belanja langsung dan tidak langsung. Realiasi keuangan selama tahun 2023 mencapai 95,26% atau sebesar Rp 64.596.999.022. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,5%. Realisasi keuangan tersebut merupakan perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

## 2.2 Gambaran Tupoksi dan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1 Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

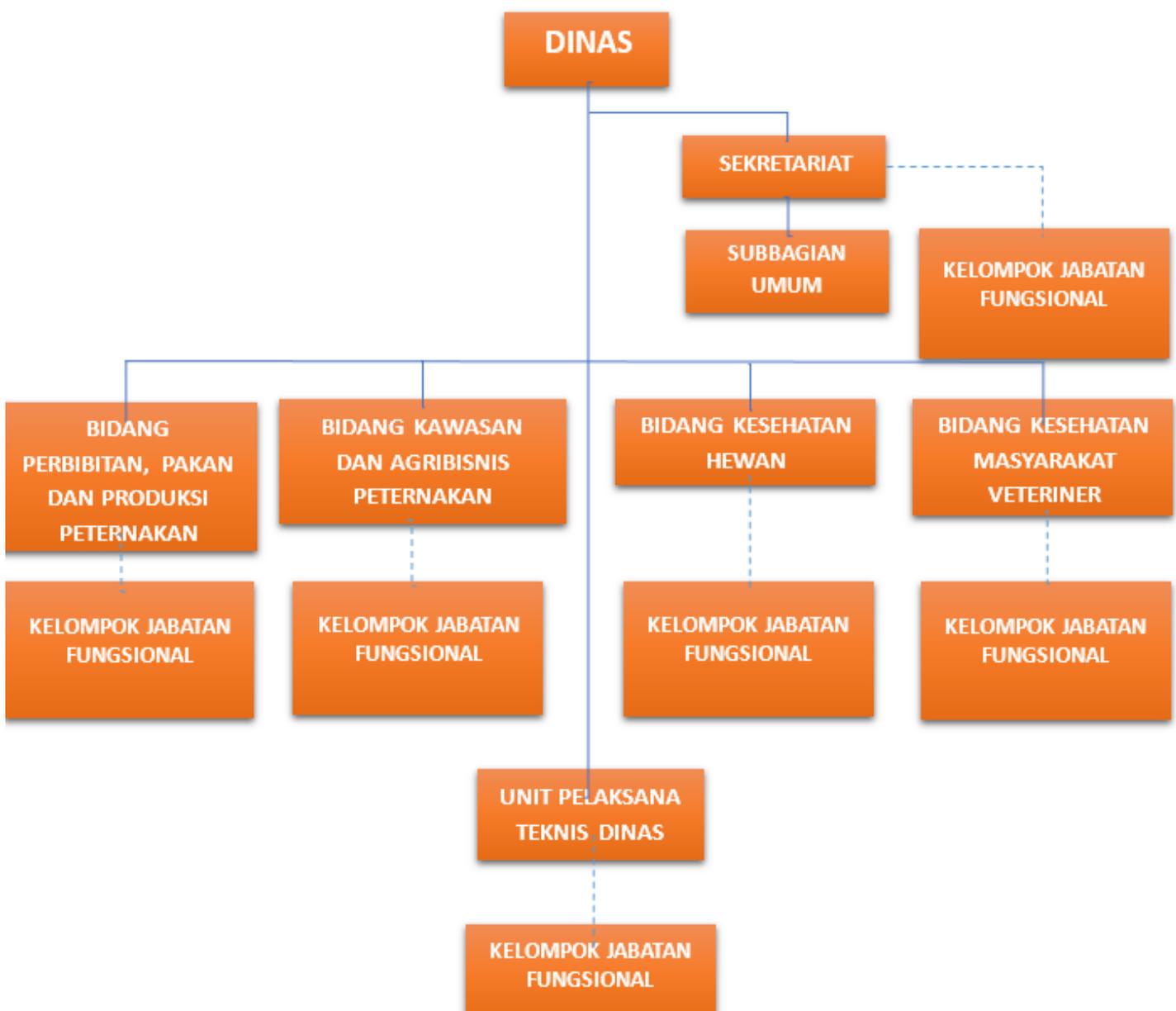
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan::
  - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan yaitu:
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan

6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
  - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
  - c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut



### 2.2.3 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

#### Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

##### Indikator:

##### Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	104,00	107,23	103,10

Pada tahun 2023 indeks yang diterima petani sebesar 123,80 dan indeks yang dibayarkan petani sebesar 113,98 sehingga diperoleh NTP Peternakan tahun 2023 sebesar 107,23. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat tinggi, karena capaian kinerja mencapai 103,10% artinya sepanjang tahun 2023 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

Tabel 4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	108,04	107,23	-0,75

Pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan NTP Peternakan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dari 108,27 menjadi 107,23 atau menurun sebesar 0,75%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk hasil peternakan. Jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir nilai NTP peternakan paling tinggi pada tahun 2019 mencapai 110,95 dan paling rendah pada tahun 2020 mencapai 101,65. Penurunan nilai NTP peternakan ini akibat dari Pandemic Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan produk hasil peternakan sehingga produksi produk peternakan cenderung menurun.

*Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya produksi pangan asal hewan*

Indikator:

1. Produksi Daging

2. Produksi Telur

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.235,08	76.110,37*	99,84
2	Produksi Telur	Ton	14.433,04	15.594,32*	108,05
Capaian Kinerja Sasaran 2					103,95

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata produksi daging dan telur mencapai 103,05% yaitu produksi daging sebesar 99,84% dan telur sebesar 108,05%.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2022
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	74.461,03	76.110,37*	2,21
2	Produksi Telur	Ton	13.834,64	15.594,32*	12,71

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging mengalami kenaikan sebesar 1.649 ton (2,21%) dari 76.235,08 ton menjadi 76.110,37 sedangkan untuk produksi telur mengalami peningkatan sebesar 12,71% atau sebanyak 1.759,68 ton dari 14.433,04 ton menjadi 15.594,32.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2023 mencapai 76.110,37\* ton mengalami peningkatan sebesar 2,21% dari tahun 2022 yaitu 74.461,03 ton. Hal ini disebabkan adanya wabah penyakit hewan nasional yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia di daerah sumber ternak untuk Provinsi Kalimantan Timur.

PMK mulai memasuki Kalimantan Timur pada bulan juni di Kabupaten Paser sehingga Pengadaan ternak dari luar Provinsi tidak dapat dilakukan dan merujuk Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 14213/KR.120/K/0/2023 tanggal 28 Mei 2022 tentang Perubahan Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 12950KR120/K/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dijelaskan Pengaturan Terhadap Lalu Lintas HRP (Hewan Rentan PMK) bahwa Kalimantan Timur tidak dapat memasukkan ternak bibit dari luar provinsi.

Produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 83.665,07 ton per tahun sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih 35 mendatangkan daging maupun produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

kualitas dan kuantitas sapi induk masih rendah, jarak kelahiran sapi (calving interval) cukup panjang, dan tingkat kematian pedet cukup tinggi.

Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 15.594,32\* ton/tahun sedangkan Konsumsi telur mencapai 26.809,03 ton/tahun. Produksi telur Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Catatan Analisis
		Tahun 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	102	102	102	102,54	104,27	108.04	102	
2	Produksi Daging (Ton)	82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08	80.917,96	75.811,96	74,461.03	76.235,08	
	Produksi Telur (Ton)	11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04	11.386,31	13.181,14	14,834.64	14.433,04	

### PENGADAAN TERNAK

Pengadaan Ternak bibit setiap tahun cenderung meningkat baik bersumber dari Anggaran APBD maupun dari Anggaran APBN. Pengadaan ternak sejak tahun 2013 sampai dengan 2022 dari anggaran APBD Provinsi dan anggaran APBN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Pengadaan Ternak Tahun 2013-2022

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2013	Sapi Bibit	1.800	1478	82,11
	Sapi Bakalan	400	250	62,5
	Sapi Potong	1080	1080	100
	Sapi BC	175	175	100
2014	Sapi Bibit	1.580	1.580	100
	Sapi Bakalan	776	776	100
	Sapi Potong	195	195	100
2015	Sapi Bibit	483	483	100
	Sapi Bakalan	472	472	100
	Sapi Potong	200	200	100
	Babi	125	125	125
2016	Sapi BC	950	95	10
	Sapi Bibit	480	480	100
	Sapi Bakalan	50	50	100
	Sapi Potong	220	220	100
2017	Sapi PO	365	365	100
	Kambing	450	450	100
	Sapi Bali	25	25	100
	Itik	400	400	100
2018	Sapi Bali	115	115	100

Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
2019	Sapi Jantan	15	15	100
	Pejantan Pemacek Sapi Bali	80	80	100
	Pemacek Brahman Cross	20	20	100
	Sapi Bali Jantan dan Betina	108	108	100
2020	Sapi Bali	368	368	100
2021	Sapi Bali	265	90	33,96
	Kambing	148	148	100
2022	Sapi Bali	116	24	20,69
	Kambing	175	175	100
	Ternak Itik	6.000	6.000	100
	Ternak Ayam	6.000	6.000	100

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Permasalahan

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1.1 Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan, Produksi dan Produktifitas Ternak Rendah;

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut. Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminansia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminansia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan kambing mengalami tren penurunan pada masing-masing -1,95%, -11,31% dan -3,09%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 9,97%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam buras, ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 3,21%, 6,15%, 2,01% dan 12,08%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -2,03%.

No.	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S a p i	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613	-1,95
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68	-11,31
3	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490	1,33
4	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.552	-3,09
5	Domba	439	590	635	694	642	9,97
6	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839	-12,71
7	Kuda	97	102	95	143	95	-0,52
8	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873	3,21
9	Ayam Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217	6,15
10	Ayam Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191	-2,03
11	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564	2,01
12	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931	-13,53
13	Puyuh	66.593	65.808	79.222	94.339	88.143	7,26
14	Merpati	4.027	4.776	5.015	5.375	5.678	8,97
15	Itik Manila	42.851	42.890	52.823	64.178	67.608	12,08

*Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022*

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pematangan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

- Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Rata-rata berat hidup sapi (Non BX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).

- Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28,84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017).
- Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- Calving interval rata-rata 19,6 bulan. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16- 17 bulan.

### 2.3.1.2 Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal

Introduksi teknologi maupun inovasi dalam bidang peternakan harus terus diupayakan untuk disosialisasikan kepada para petani dan peternak. Berbagai informasi teknologi dan inovasi terbaru yang telah dikembangkan hendaknya dapat diterapkan pada mitra (petani dan peternak) secara penuh dan berkelanjutan. Penerapan teknologi yang tepat dapat menjawab masalah Harga pokok Produksi (HPP) ternak di Kalimantan Timur. Meningkatnya Harga Pokok Produksi Ayam Pedaging Tahun 2012 hanya 13.500 /kg sedangkan Tahun 2022 menjadi 23.500 / kg atau naik 74%. (PINSAR, 2022) menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing produk peternakan di Kalimantan Timur.

Teknologi yang diterapkan untuk menekan HPP dapat berupa penerapan penggunaan kandang tertutup (Closed House System), Inovasi penggunaan bahan pakan baru seperti maggot, penggunaan pakan fermentasi dan teknologi Bank Pakan. Budidaya ayam padaging dan ayam petelur dipelihara menggunakan kandang sistem open house dan closed house, saat ini di teknologi pemeliharaan dengan kandang closed house di Kalimantan Timut sebanyak 45%.

### 2.3.1.3 Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik

berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijauan mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

#### 2.3.1.4 Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.
4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat. Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### 2.3.1.5 Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kejadian penyakit baru selain PMK yang harus diwaspadai adalah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, dan Penyakit Lumpie Skin Deasease (LSD). Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceosis.

Kejadian penyakit Avian Influenza (AI) meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 76 kasus dari Tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, kejadian penyakit ASF meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.251 ekor dari Tahun 2021. sebanyak 784 ekor, dan PMK mulai terjadi Tahun 2022 sebanyak 123 ekor. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kalimantan Timur seperti Rabies, Salmonellosis, fasiolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/paramedik dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut. Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus

dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

#### 2.3.1.6 Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa. Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medik dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada di setiap kecamatan.

#### 2.3.1.7 Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga Kalimantan Timur menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kalimantan Timur hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat izin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak. Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point. Kegiatan

penguatan chek point di perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus baik SDM teknis, Sarana prasarana dan penguatan sistem.

#### 2.3.1.8 Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan kualitas hasil peternakan baik yang bersifat zoonosis dan non zoonosis yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan Analisa hasil uji laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer.

Kondisi perkembangan kasus kejadian penyakit hewan saat ini begitu pesat, Seperti contoh Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Diseases (LSD), kedua penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi sehingga dalam menentukan uji penyakit ini harus secara cepat dan akurat, sehingga segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan prosedur tetap. Dengan kondisi tersebut maka perlu peningkatan pelayanan dalam hal penambahan ruang lingkup uji maupun pengembangan sistem/metode pengujian sehingga deteksi penyakit akan lebih cepat dan akurat.

#### 2.3.1.9 Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan asal hewan meningkat saat masa pandemic Covid-19, mulai dari daging dan telur ayam, daging sapi yang termasuk ke dalam pangan asal hewan. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, pangan asal hewan berpotensi dapat membahayakan manusia dan kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, kimia, dan zat yang membahayakan sangat tinggi.

Kesadaran tentang pentingnya kebutuhan protein hewani juga perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak/balita kasus stunting. Stunting memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan balita. Adapun

dampak jangka pendeknya yaitu meningkatnya angka kesakitan dan kematian, dan adanya risiko bagi balita stunting menderita berbagai penyakit infeksi. Sementara dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif, dan rendahnya Intelligence Quotion (IQ) dan kapasitas fisik.

Kementrian Kesehatan menyatakan "bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak", (<https://promkes.kemkes.go.id/protein-hewani-cegah-stunting>), kontribusi sub sektor peternakan sangat diperlukan dalam penanganan kasus stunting, selain itu dilakukan untuk upaya mewujudkan keamanan pangan di Kalimantan Timur adalah dengan menerapkan pola pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, halal), yaitu pangan yang bebas dari kontaminasi berbahaya (kontaminasi fisik, kimia atau biologis), memiliki nilai gizi yang tinggi, tidak tercampur bahan lain, dan diolah berdasarkan syariat Islam sehingga halal untuk dikonsumsi.

#### 2.3.1.10 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional. Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada

pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Surveillance pangan asal ternak terhadap cemaran mikroba, Bahan kimia dan spesies babi Tahun 2022 berturut-turut 57,23% dengan jumlah 636 sampel, 3% dengan jumlah 933 sampel, dan 1,23% dengan jumlah 486 sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan asal ternak perlu mendapatkan perhatian dalam keamanannya.

#### 2.3.1.11 Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur

Sapi Betina Produktif merupakan sapi betina yang dinyatakan normal organ reproduksi/ peranakan yang dinyatakan oleh dokter hewan atau petugas peternakan. Sesuai dengan Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Akibat Pemotongan sapi Betina produktif adalah terhentinya aktifitas produksi pedet (anak sapi) untuk regenerasi selanjutnya, Pemotongan sapi betina produkif mengakibatkan penurunan populasi secara signifikan. Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur termasuk relatif tinggi, walaupun masih perlu di konfirmasi apakah sapi tersebut sudah tidak produktif atau masih produktif.

Tingginya Pemotongan sapi betina ini perlu dilakukan verifikasi bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif, dan dicarikan solusi atas ketersediaan stok sapi tersebut. Jika larangan Pemotongan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumnya dan ini berlaku pula untuk Pemotongan ternak ruminansia kecil dengan ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 86.

### 2.3.1.12 Terbatasnya Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewayaharan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

### 2.3.1.13 Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
2. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.

#### 2.3.1.14 Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

1. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih

rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan.

#### 2.3.1.15 Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
2. Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan. Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

### 2.3.1.16 Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

Masalah fluktuasi harga komoditas ayam potong yang dapat memicu inflasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, mengingat konsumsi ayam potong cukup tinggi di masyarakat Kalimantan Timur yaitu 79% dari total konsumsi daging. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas ayam potong antara lain:

1. Faktor musim dan cuaca. Harga ayam potong dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca, seperti peningkatan permintaan pada saat perayaan hari besar atau cuaca buruk yang mengganggu produksi peternakan ayam.
2. Kenaikan harga pakan ternak. Harga pakan ternak yang tinggi dapat membuat biaya produksi peternakan ayam meningkat dan berdampak pada kenaikan harga ayam potong.
3. Kondisi kesehatan ternak. Jika ada wabah penyakit ternak atau kondisi kesehatan ternak yang buruk, produksi ayam potong bisa menurun dan harga ayam potong bisa naik.
4. Ketergantungan terhadap impor. Indonesia masih mengimpor ayam potong dalam jumlah yang cukup besar. Jika terjadi kenaikan harga ayam potong di pasar internasional, maka harga ayam potong di dalam negeri juga bisa naik.

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail maka diperlukan informasi Supply demand yang memadai akurat dan terpercaya, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Kolaborasi antar perangkat Dinas terkait pengendalian inflasi dan kenaikan harga sangat diperlukan, dengan lebih mendalam memahami kondisi stok barang, produksi lokal, pemasukkan dari luar daerah dan rantai distribusi yang menyebabkan dan faktor kenaikan harga

### 2.3.2 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang ada digabung menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Keterkaitan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024-2026 dengan Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Kota Se-Kalimantan Timur.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021–2026: “Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Peternakan Dengan Menerapkan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Menjadikan Petani Yang Kreatif, Inovatif, Dan Mandiri Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2021–2026: “Mewujudkan Swasembada Dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016–2021: "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan".
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinerjis dan Berkelanjutan”.

7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021–2026: Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang adalah: 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan; 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah misi nomor 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan nomor 1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

### 2.3.3 Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut:” Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi

sumberdaya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas

masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi padarantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan sertap engendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antarlain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

## 2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.4.1 Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga Tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

#### 1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

##### a. Sumber Daya Manusia

Dalam kurun waktu 2011-2022 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

##### b. Prasarana dan Sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan

dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang

d. Konsistensi Penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima Tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah

2. Tantang Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.

- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal
- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan Pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kalimantan Timur bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

#### 2.3.4.2 Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

##### 1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9 Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	10,961.24	12,444.65	10,694.27	9,924.65	7,091.87
2	K e r b a u	1,360.47	1,667.58	2,391.48	3,346.89	61.18
3	Kuda	0.18	0.63	1.81	1.36	0.29
4	Kambing	745.89	693.59	826.10	877.53	783.33
5	Domba	8.32	11.07	36.25	15.32	5.19
6	Babi	1,400.94	1,803.70	1,830.40	2,302.49	2,348.23
7	Ayam Buras	4,798.66	4,592.02	4,657.96	4,720.67	4,815.08
8	Ayam Petelur	452.21	365.77	522.29	629.19	641.77
9	Ayam Pedaging	63,028.77	69,243.31	60,372.41	65,702.56	54,830.23
10	I t i k	392.71	499.28	644.86	115.38	104.43
11	Kelinci	6.32	3.95	4.82	4.21	4.30
12	Puyuh	6.76	6.19	7.48	8.92	9.05
13	Merpati	1.05	1.25	1.31	1.40	1.43
14	Itik Manila	26.87	26.89	33.12	40.24	41.04
<b>Jumlah</b>		<b>83.190,37</b>	<b>91.359,87</b>	<b>82.024,57</b>	<b>87.690,81</b>	<b>70.737,42</b>

Pada Tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 Ton dibandingkan dengan Tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 Ton. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,68% dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 12.444,65 Ton atau sebesar 11,9%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 Ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor peternakan dan keterbatasan pasokan daging serta kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah. Meskipun konsumsi daging mengalami penurunan pada Tahun 2020 hal ini kemungkinan bersifat sementara dan bisa kembali meningkat setelah pandemi berakhir dan perekonomian pulih kembali.

Berdasarkan data konsumsi daging pada tabel diatas dimulai Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 Tahun terakhir mencapai 69.243,31 Ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kalimantan Timur.

*Pemenuhan konsumsi daging dalam rangka pembangunan IKN*

Peningkatan kebutuhan daging pada pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- (1) Melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan daging yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi penghitungan terhadap jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara, pertumbuhan populasi yang diharapkan, preferensi konsumsi daging, serta kebutuhan daging untuk sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan tenaga kerja.
- (2) Peningkatan produksi dalam daerah (lokal Kalimantan Timur), yaitu dengan mendorong peningkatan produksi daging dalam daerah dari peternak-peternak lokal, termasuk peternakan sapi, kambing, domba, dan ayam, untuk meningkatkan jumlah ternak yang diproduksi. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui program-program pengembangan peternakan, peningkatan teknologi peternakan, pemenuhan pakan berkualitas, dan pengelolaan kesehatan hewan yang baik.
- (3) Peningkatan produktifitas perlu juga dilakukan, hal ini dapat dicapai melalui seleksi genetik yang baik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif, penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan pakan berkualitas tinggi, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien.
- (4) Kerjasama dengan peternak lokal menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan daging. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan peternak lokal, memberikan bantuan teknis, dukungan pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal dalam memproduksi daging yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan.
- (5) Diversifikasi sumber protein selain daging, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber protein, termasuk sumber protein nabati, untuk mengurangi tekanan terhadap sektor peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian vertikal, pengembangan tumbuhan protein alternatif, serta promosi pola makan yang seimbang.

Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan daging untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, peternak, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pemenuhan kebutuhan.

Tabel 10 Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)

Komoditas	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
S a p i	7,091.87	7,304.63	7,636.99	7,866.10	8,102.08	14,207.04
K e r b a u	61.18	63.02	65.88	67.86	69.89	122.56
Kuda	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.58
Kambing	783.33	806.83	843.54	868.85	894.91	1,569.23
Domba	5.19	5.35	5.59	5.76	5.93	10.40
Babi	2,348.23	2,418.68	2,528.73	2,604.59	2,682.73	4,704.18
Ayam Buras	4,815.08	4,959.53	5,185.19	5,340.75	5,500.97	9,645.98
Ayam Petelur	641.77	661.02	691.10	711.83	733.19	1,285.65
Ayam Pedaging	54,830.23	56,475.14	59,044.76	60,816.10	62,640.58	109,840.64
I t i k	104.43	107.56	112.46	115.83	119.31	209.20
Kelinci	4.30	4.43	4.63	4.77	4.91	8.61
Puyuh	9.05	9.32	9.75	10.04	10.34	18.13
Merpati	1.43	1.47	1.54	1.59	1.63	2.86
Itik Manila	41.04	42.27	44.19	45.52	46.89	82.21
<b>Total</b>	<b>70,737.42</b>	<b>72,859.54</b>	<b>76,174.65</b>	<b>78,459.89</b>	<b>80,813.69</b>	<b>141,707.29</b>

Tabel 11 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)

No	Jenis Telur	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam Buras	2,926.55	2,800.53	2,840.75	3,084.63	3,177.17
2	Ayam Petelur	8,137.38	6,581.97	9,398.44	9,435.03	9,718.08
3	I t i k	1,366.89	1,398.21	1,398.57	1,434.34	1,477.37
4	Puyuh	67.92	67.12	80.81	96.23	99.11
5	Itik Manila	235.25	235.47	290.00	352.34	362.91
	Jumlah	12,734.00	11,083.30	14,008.57	14,402.56	14,834.64

Struktur konsumsi telur pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 jumlah konsumsi telur mencapai 12.734,00 Ton. Pada Tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan mencapai 11.083,30 Ton. Kemudian naik signifikan atau mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022.

#### *Pemenuhan konsumsi telur dalam rangka pembangunan IKN*

Telur merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, kaya nutrisi, praktis, dan terjangkau. Kelebihan ini menjadikan telur sebagai komoditas peternakan yang penting dalam pemenuhan pangan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan dan gizi masyarakat.

Telur menjadi pilihan komoditas peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan IKN, dimana telur memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Sumber protein yang berkualitas
2. Nutrisi yang lengkap, Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin (A, D, E, B12, riboflavin), mineral (zat besi, seng, selenium), asam lemak sehat, kolin, dan antioksidan.
3. Harga terjangkau,
4. Fleksibilitas dalam penggunaan, Telur dapat digunakan dalam berbagai cara dalam makanan dan masakan. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi dalam pola makan dan memenuhi preferensi masyarakat.
5. Daya tahan yang baik (Daya simpan)
6. Sumber energi yang baik

Tabel 12 *Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN*

Jenis Telur	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2025
Ayam Buras	1,588.59	1,636.25	1,710.70	1,788.53	1,869.91	4,354.90
Ayam Petelur	23,532.14	24,238.10	25,340.94	26,493.95	27,699.43	64,510.06
Itik	1,314.86	1,354.31	1,415.93	1,480.35	1,547.71	3,604.50
Puyuh	59.47	61.25	64.04	66.96	70.00	163.03
Itik Manila	322.99	332.68	347.82	363.64	380.19	885.43
Total	26,818.05	27,622.59	28,879.42	30,193.43	31,567.23	73,517.92

## 2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Daya tampung ternak mengacu pada kapasitas produksi maksimal dari suatu kawasan atau peternakan. Pernyataan bahwa daya tampung ternak masih tinggi dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan populasi ternak pada suatu kawasan atau peternakan. Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkubanan sawit dan lahan ex

tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya peternakan berbasis korporasi.

### 3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

Data populasi ternak mulai Tahun 2016-2020 tercatat kenaikan dengan rasio 1,54% untuk Sapi, 1,72% untuk Kambing, 12,93% untuk Domba, 10,76% untuk Kuda, 16,97% untuk ayam petelur, 1,96% untuk Itik, 14,49% untuk Iti Manila. Kerbau 2,26%, Ayam buras 2,08% dan Puyuh 9,91% disamping kenaikan ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan seperti Babi sebesar -0,12%, Sapi Perah sebesar -8,24%, Kelinci sebesar -8,96%. Perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	117,504	119,485	119,974	121,290	108,613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kerbau	6,157	6,194	6,552	6,539	6,490
4	Kambing	66,378	67,892	69,929	68,997	58,552
5	Domba	439	590	635	694	642
6	Babi	78,968	82,546	83,652	76,292	45,839
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Ayam Buras	4,569,169	4,372,415	4,435,205	4,815,976	5,183,873
9	Ayam Petelur	1,055,432	853,693	1,218,994	2,263,835	1,340,217
10	Ayam Pedaging	66,672,445	67,886,566	59,402,832	55,877,917	61,412,191
11	Itik	248,978	254,683	254,749	261,263	269,564
12	Kelinci	14,189	8,859	10,830	9,462	7,931
13	Puyuh	66,593	65,808	79,222	94,339	88,143
14	Merpati	4,027	4,776	5,015	5,375	5,678
15	Itik Manila	42,851	42,890	52,823	64,178	67,608

### 4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada Tahun 2018-2022 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 77 unit. Selain itu telah tumbuh upgrade kandang tertutup dari kandang terbuka dalam budidaya ayam potong mencapai 45%.

### 5. Kontribusi peran dalam pengurangan kasus stunting

Peran peternakan dalam penanganan kasus stunting pada anak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

- a) *Sumber Protein Berkualitas*, Peternakan menyediakan sumber protein berkualitas tinggi seperti daging, susu, dan telur. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Konsumsi protein yang cukup membantu memperbaiki status gizi anak yang mengalami stunting dan mendorong pertumbuhan linier yang optimal.
- b) *Asupan Zat Gizi Mikro*, Produk hewani seperti susu dan telur mengandung zat gizi mikro penting seperti zat besi, kalsium, vitamin B12, dan vitamin A. Kekurangan zat gizi mikro ini dapat menyebabkan stunting pada anak. Dengan memperoleh sumber makanan hewani yang kaya zat gizi mikro melalui peternakan, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
- c) *Diversifikasi Pangan*, Peternakan dapat membantu dalam diversifikasi pangan, yaitu memperluas variasi makanan yang tersedia bagi anak-anak. Dengan memiliki peternakan yang beragam, seperti peternakan ayam, kambing, sapi, atau ikan, keluarga dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan hewani yang memberikan nutrisi yang berbeda. Diversifikasi pangan penting untuk memastikan asupan gizi yang seimbang dan mengatasi kekurangan nutrisi yang mungkin menyebabkan stunting.
- d) *Ketersediaan Pangan Lokal*, Peternakan lokal dapat meningkatkan ketersediaan pangan hewani di wilayah tersebut. Ini akan mengurangi ketergantungan pada impor makanan hewani dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi keluarga dengan anggaran terbatas. Ketersediaan pangan lokal yang baik memungkinkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang lebih segar dan berkualitas.
- e) *Edukasi dan Pengetahuan Gizi*, Peternakan dapat berperan sebagai agen pendidikan dan memberikan informasi tentang manfaat gizi dan pentingnya makanan hewani dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peternak dapat memberikan edukasi tentang nutrisi yang baik, praktik peternakan yang sehat, serta pentingnya asupan gizi yang seimbang dalam mengatasi stunting. Dengan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat, peternakan berkontribusi pada kesadaran akan pentingnya gizi.

## 6. Kontribusi peran dalam pengurangan kemiskinan

Peran peternakan dalam penanganan kemiskinan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

- a) *Peningkatan Pendapatan*, Peternakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Dengan memiliki peternakan yang berkelanjutan dan produktif, keluarga peternak dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari penjualan produk hewani, seperti daging dan telur. Pendapatan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.
- b) *Pangan dan Keamanan Gizi*, Peternakan dapat menyediakan sumber makanan hewani yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Konsumsi protein dan zat gizi mikro yang cukup dari produk hewani membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, peternakan juga dapat membantu dalam diversifikasi pangan dengan menyediakan berbagai jenis makanan, yang membantu dalam mengatasi kekurangan nutrisi dan mencapai keamanan pangan yang lebih baik.
- c) *Pemberdayaan Ekonomi*, Peternakan dapat memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dengan melibatkan keluarga dalam kegiatan peternakan, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola peternakan dengan efisien. Selain itu, melalui koperasi peternakan atau asosiasi peternak, keluarga dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, memperoleh harga yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memasarkan produk peternakan.
- d) *Pemberdayaan Perempuan*, Peternakan dapat memberikan peluang pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan peternakan, seperti pemeliharaan ternak, produksi makanan, atau pengolahan produk hewani. Melalui keterlibatan aktif dalam peternakan, perempuan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, memperoleh keahlian baru, dan memperkuat peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan dengan strategi peningkatan produksi dan produktivitas ternak, dan arah kebijakan yang terdiri dari optimalisasi reproduksi ternak, meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak, meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, dan pengembangan dan penguatan kelembagaan peternak. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023:

Tabel 14 Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target 2025	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Program (Rp)
Meningkatkan Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara		Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	2,14					
	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani Peternak	Nilai	109,12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97.29	2,995,563,353
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95.81	3,394,173,640
					Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Peternakan	Skor	99.73	3,254,022,490
	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	Produksi Daging	Ton	77.773,30	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88.00	40,770,488,609
Produksi telur		Ton	15.799,20	Program Penyediaan dan Pengembangan	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99.72	15,727,562,222	

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target 2025	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Pagu Program (Rp)
					ngan Prasarana Pertanian				
		Produksi Ternak Lainnya	Ton	183,70	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92.41	8,534,628,899

#### 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam RKPD tahun 2025.

Tabel 15 Review Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					107,107,243,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur			134,567,158,000
2.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					85,865,799,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			117,333,677,686
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	95,17		32,121,106,000	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	95,17	42,397,366,433
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100.00			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	92.00		2,134,210,000	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	92.00	1,781,554,677
3.27.01.1.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	Provinsi Kalimantan Timur	746,975,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	548,090,512
3.27.01.1.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	30,638,800
3.27.01.1.01.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	12,083,264
3.27.01.1.01.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	426,842,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	101,397,391

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	746,973,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	1,089,344,710
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91.00</b>		<b>23,157,430,000</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91.00</b>	<b>32,982,245,841</b>
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	Provinsi Kalimantan Timur	21,450,063,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182	31,965,778,615
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Timur	853,684,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	720,783,625
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	7,709,856
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	11,964,952
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	480,197,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	252,742,919
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	160,066,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	23,265,874
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>		<b>533,551,000</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>	<b>143,599,900</b>

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10,477,000
3.27.01.1.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	80,405,900
3.27.01.1.0 3.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur	320,131,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	52,717,000
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>		<b>693,617,000</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>	<b>668,142,443</b>
3.27.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	268,939,656
3.27.01.1.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	15,680,000
3.27.01.1.0 5.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	Provinsi Kalimantan Timur	160,066,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	136,100,723
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	Provinsi Kalimantan Timur	320,131,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	247,422,064
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>1,814,077,000</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>	<b>1,238,499,345</b>
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Provinsi Kalimantan Timur	53,355,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	31,134,806

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	34	Provinsi Kalimantan Timur	426,842,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	217,162,113
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	130,350,426
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Timur	53,355,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	17	33,252,000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,173,815,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	826,600,000
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>533,552,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>	<b>1,894,439,236</b>
3.27.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	Provinsi Kalimantan Timur	426,842,000	-	-	-	-
3.27.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	78	1,894,439,236
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>1,920,788,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>	<b>1,690,132,036</b>
3.27.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur	106,710,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	16,668,000

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur	533,552,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	435,259,180
3.27.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur	1,280,526,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,238,204,856
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>1,333,881,000</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>	<b>1,998,752,955</b>
3.27.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	Provinsi Kalimantan Timur	224,092,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	319,453,400
3.27.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	Provinsi Kalimantan Timur	480,197,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168	125,061,150
3.27.01.1.0 9.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	Provinsi Kalimantan Timur	202,750,000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	23,024,400
3.27.01.1.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	Provinsi Kalimantan Timur	426,842,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	7	1,531,214,005
<b>3.27.02</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>88.00</b>		<b>28,975,398,000</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>88.00</b>	<b>40,770,488,609</b>

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97,29		3,894,543,000	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97,29	2,995,563,353
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27.00		2,726,180,000	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27.00	1,838,561,446
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410,000			Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410,000	
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62			Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62	
		Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660			Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660	
		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	920		1,168,363,000	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	920	1,157,001,907
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,726,180,000	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4.00	1,838,561,446
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,168,363,000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	3.00	1,157,001,907
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	61,5		7,290,584,000	Persentase Calving Rate	%	61,5	1,881,588,247
		Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13			Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13	
		Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225			Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225	
		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85		3,084,478,000	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85	1,361,575,105
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	60			Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	61,50	

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>119</b>			<b>Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>119</b>	
3.27.02.1.0 4.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	7,290,584,000	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1,881,588,247
3.27.02.1.0 4.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	3,084,478,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	1,361,575,105
3.27.02.1.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>		<b>3,645,292,000</b>	<b>Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>	<b>2,751,279,055</b>
		<b>Luasan HPT</b>	<b>Ha</b>	<b>1225</b>		<b>4,206,106,000</b>	<b>Luasan HPT</b>	<b>Ha</b>	<b>1225</b>	<b>1,960,615,869</b>
3.27.02.1.0 5.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	3,645,292,000	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	2,751,279,055

Rancangan Awal Rencana Kerja 2025							Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.0 5.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	4,206,106,000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Dokumen	1	1,960,615,869
<b>3.27.02.1.06</b>	<b>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</b>	<b>Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman</b>	<b>%</b>	<b>47</b>		<b>934,690,000</b>	<b>Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman</b>	<b>%</b>	<b>47</b>	<b>743,219,568</b>
3.27.02.1.0 6.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	934,690,000	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	743,219,568
<b>3.27.02.1.07</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>	<b>Jumlah Pengadaan Ternak</b>	<b>(Indukan/Bibit)</b>	<b>4700</b>		<b>9,814,248,000</b>	<b>Jumlah Pengadaan Ternak</b>	<b>(Indukan/Bibit)</b>	<b>4700</b>	<b>32,072,210,765</b>
3.27.02.1.0 7.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1300	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	9,814,248,000	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	3773	32,072,210,765
<b>3.27.03</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,72</b>		<b>1,557,817,000</b>	<b>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,72</b>	<b>15,727,562,222</b>
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	147		1,557,817,000	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	147	15,727,562,222
		Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	120			Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	120	
		Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	4			Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	4	

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.03.1.0 1.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,557,817,000	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	15,727,562,222
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41		8,412,213,000	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41	8,534,628,899
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81		4,673,453,000	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81	3,394,173,640
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68		2,336,726,000	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68	2,762,979,781
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80		2,804,071,000	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80	3,230,451,920
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	45,8			Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	45,8	
		Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	22,5		701,018,000	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	22,5	416,932,732
3.27.04.1.0 1.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,518,872,000	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	2,176,928,353
3.27.04.1.0 1.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	817,854,000	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35	586,051,428
3.27.04.1.0 1.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,804,071,000	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	3,230,451,920

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.0 1.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	701,018,000	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	416,932,732
3.27.04.1.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan</b>	%	<b>80</b>		<b>1,869,381,000</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan</b>	%	<b>80</b>	<b>1,472,267,649</b>
		<b>Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ</b>	%	<b>2,85</b>		<b>467,345,000</b>	<b>Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ</b>	%	<b>2,85</b>	<b>340,196,845</b>
3.27.04.1.0 2.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,869,381,000	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	12	1,472,267,649
3.27.04.1.0 2.05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	467,345,000	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	340,196,845
3.27.04.1.03	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ</b>	<b>Unit</b>	<b>36</b>		<b>934,690,000</b>	<b>Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ</b>	<b>Unit</b>	<b>36</b>	<b>728,732,704</b>
		<b>Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)</b>	%	<b>86</b>		<b>1,635,708,000</b>	<b>Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)</b>	%	<b>86</b>	<b>1,314,245,400</b>
		<b>Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan</b>	%	<b>1,41</b>		<b>233,673,000</b>	<b>Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan</b>	%	<b>1,41</b>	<b>314,665,683</b>

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif</b>	%	23,5		1,168,363,000	<b>Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif</b>	%	23,5	798,833,532
		<b>Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting</b>	Gram/hari	30,5		233,673,000	<b>Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting</b>	Gram/hari	30,5	283,417,693
3.27.04.1.0 3.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	934,690,000	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13	728,732,704
3.27.04.1.0 3.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	899,639,000	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	418,226,300
3.27.04.1.0 3.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	6	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	233,673,000	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	9	314,665,683
3.27.04.1.0 3.05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	10	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	736,069,000	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	10	896,019,100
3.27.04.1.0 3.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,168,363,000	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	798,833,532
3.27.04.1.0 3.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	100	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	233,673,000	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	283,417,693

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	60		701,018,000	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	60	266,078,600
3.27.04.1.04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	60	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	701,018,000	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	60	266,078,600
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,59		778,909,000	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,59	259,872,040
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	65,8		623,127,000	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	65,8	123,303,460
		Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	126		155,782,000	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	126	136,568,580
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	623,127,000	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790	123,303,460
3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	155,782,000	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	136,568,580

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,73</b>		<b>5,452,360,000</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,73</b>	<b>3,254,022,490</b>
3.27.07.1.02	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rasio SD komoditas/ produk peternakan</b>	<b>rasio</b>	<b>1,146</b>		<b>545,236,000</b>	<b>Rasio SD komoditas/ produk peternakan</b>	<b>rasio</b>	<b>1,146</b>	<b>280,980,382</b>
		<b>Jumlah peternak millennial</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>		<b>1,635,708,000</b>	<b>Jumlah peternak millennial</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>333,195,496</b>
		<b>Jumlah pembudidaya unggas</b>	<b>RTUP</b>	<b>49310</b>			<b>Jumlah pembudidaya unggas</b>	<b>RTUP</b>	<b>49310</b>	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	545,236,000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	280,980,382
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,635,708,000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15	333,195,496
3.27.07.1.03	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>Jumlah Desa Korporasi Ternak</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>		<b>3,271,416,000</b>	<b>Jumlah Desa Korporasi Ternak</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>	<b>2,639,846,612</b>
3.27.07.1.03.05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,180,944,000	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	1,956,093,952
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	13	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,090,472,000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	13	683,752,660
<b>2.02</b>	<b>UPTD, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>					<b>7,789,086,000</b>	<b>UPTD, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>			<b>11,567,368,092</b>
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>95,17</b>		<b>3,660,870,000</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>95,17</b>	<b>8,663,528,153</b>

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	%	<b>100</b>			<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	%	<b>100</b>	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91</b>		<b>292,870,000</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91</b>	<b>147,070,380</b>
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Penajam Paser utara	237,957,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	145,200,000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Penajam Paser utara	54,913,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1,870,380
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>366,087,000</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>	<b>50,879,625</b>
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Penajam Paser utara	73,217,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,870,380
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Penajam Paser utara	146,435,000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	43,248,865
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Penajam Paser utara	146,435,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5,760,380
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>549,131,000</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>	<b>112,972,300</b>
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Penajam Paser utara	366,087,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	49,300,000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	183,044,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	63,672,300

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>		<b>732,173,000</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>	<b>383,431,644</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Penajam Paser utara	73,217,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	20,338,395
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Penajam Paser utara	109,826,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	25,660,679
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Penajam Paser utara	73,217,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	24,232,570
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Penajam Paser utara	73,217,000	-	-	-	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	402,696,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	313,200,000
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>		<b>439,304,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>	<b>162,038,546</b>
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	Penajam Paser utara	219,652,000	-	-	-	-
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	Penajam Paser utara	219,652,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	162,038,546

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>83</b>		<b>732,174,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>83</b>	<b>958,989,200</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Penajam Paser utara	73,217,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	14,780,000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Penajam Paser utara	292,870,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	154,132,800
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Penajam Paser utara	366,087,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	790,076,400
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	%	<b>83</b>		<b>549,131,000</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	%	<b>83</b>	<b>6,848,146,458</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	Penajam Paser utara	73,217,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	141,945,500
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	Penajam Paser utara	237,957,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	168,735,200
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	Penajam Paser utara	237,957,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	6,537,465,758

Rancangan Awal Rencana Kerja 2025							Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	98,73		4,128,216,000	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	98,73	2,903,839,939
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	194		2,270,519,000	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	194	1,420,271,920
		angka kelahiran	%	26,1			angka kelahiran	%	26,10	
		Calving Interval	Bulan	16,66			Calving Interval	Bulan	16,66	
		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	5,00			Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	5,00	
		Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,05			Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,05	
		Jumlah produksi pupuk	Ton	20		1,857,697,000	Jumlah produksi pupuk	Ton	20	1,483,568,019
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols /kg)	15,000			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols /kg)	15,000	
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1,800			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1,800	
		Jumlah PAD	Rupiah	120,000,000			Jumlah PAD	Rupiah	120,000,000	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,270,519,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	1,420,271,920
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,857,697,000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	1,483,568,019

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03	UPTD, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					13,452,358,000	UPTD, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			5,666,112,222
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	95,17		11,271,414,000	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	95,17	3,595,239,736
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	91		261,713,000	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	91	124,791,000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Samarinda	212,642,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	118,920,000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Samarinda	49,071,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5,871,000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	83		327,142,000	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	83	31,954,300
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Samarinda	65,428,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5,301,140
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Samarinda	130,857,000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15,531,140
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Samarinda	130,857,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	11,122,020
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	83		490,713,000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	83	109,737,000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	Samarinda	163,571,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	37,737,000

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	327,142,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	72,000,000
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>		<b>588,853,000</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>	<b>299,090,881</b>
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Samarinda	65,428,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10,344,647
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	Samarinda	98,142,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	36,754,568
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Samarinda	65,428,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	33,171,666
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	Samarinda	65,428,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	3,960,000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	294,427,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	214,860,000
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>		<b>8,392,570,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>	<b>1,993,167,358</b>
3.27.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Samarinda	196,285,000	-	-	-	-

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	Samarinda	8,000,000,000	-	-	-	-
3.27.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	Samarinda	196,285,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	1,993,167,358
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>654,283,000</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83</b>	<b>704,867,700</b>
3.27.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Samarinda	65,428,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	17,356,000
3.27.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Samarinda	261,713,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	196,454,000
3.27.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Samarinda	327,142,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	491,057,700
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>556,140,000</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83</b>	<b>331,631,497</b>
3.27.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	Samarinda	65,428,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	101,120,000
3.27.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67	Samarinda	212,642,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	160,631,497

Kode	Rancangan Awal Rencana Kerja 2025						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.0 9.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	Samarinda	65,428,000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	46,900,000
3.27.01.1.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	Samarinda	212,642,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	22,980,000
<b>3.27.04</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Skor</b>	<b>99,18</b>		<b>2,180,944,000</b>	<b>Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Skor</b>	<b>99,18</b>	<b>2,070,872,486</b>
3.27.04.1. 03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	45		2,180,944,000	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	45	2,070,872,486
		Nilai Kepuasan pelanggan	Score	86			Nilai Kepuasan pelanggan	Score	86	
		Jumlah PAD	Rupiah	212,000,000			Jumlah PAD	Rupiah	212,000,000	
3.27.04.1.0 3.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,180,944,000	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	2,070,872,486

## 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Tabel 16 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kota Balikpapan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Sapi	1 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
2	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Sapi	2 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
3	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Kambing	2 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
4	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kabupaten Paser	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Sapi	4 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
5	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Sapi	1 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
6	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Kambing	2 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan
7	Pengembangan Desa Korporasi Ternak	Kota Samarinda	Pengembangan Desa Korporasi Ternak Kambing	1 unit	Belum dilakukan Verifikasi CPCL di Lapangan

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema “Penggerak Utama Kawasan Timur Indonesia”, maka untuk mendukung pencapaian Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 tersebut maka Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam empat program prioritas yaitu:

- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Program nilai tambah dan daya saing industry
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

##### 1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2025 sebesar 399,61 ribu ton, target produksi daging ayam tahun 2025 sebesar 4.339,6 ribu ton, target produksi daging itik tahun 2025 sebesar 44,66 ribu ton, target produksi daging babi tahun 2025 sebesar 104,49 ribu ton, target produksi daging kambing tahun 2025 sebesar 42,15 ribu ton, dan target produksi daging domba tahun 2025 sebesar 35,83 ribu ton. Target tersebut merupakan penyediaan protein hewani.

##### 2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah Dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2025 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2025 adalah “Kolaborasi dan Sinergi Membangun Peternakan Kalimantan Timur untuk Nusantara”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
  - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
  - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
  - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan

- d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
- f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

#### 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan periode 2024-2026. Rencana Kinerja Tahun 2024 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 17 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)	2,14
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja (Poin)</li> <li>• Indek Kepuasan Masyarakat (Poin)</li> </ul>	79,30 85,50

### 3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging, telur dan produksi aneka ternak lainnya, maka sasaran rencana kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	109,12
2	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	<u>Produksi (Ton):</u> - Daging - Telur - Ternak Lainnya	77.773,30 15.799,2 183,70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin)</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)</li> </ul>	79,30 85,50

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik dan

peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

”Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Korporasi peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai produsen utama produk peternakan seperti daging, susu, dan telur, korporasi peternakan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan asal hewan di dalam negeri, serta menghasilkan produk-produk yang dapat diekspor ke luar negeri.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

### 3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di implementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025. Adapun jumlah Kegiatan yang tercantum dalam rancangan akhir rencana kerja yaitu 22 kegiatan dan 100 sub kegiatan. Berikut Kegiatan dan sub kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provisini

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:

- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
- c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan
- e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
- Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
- Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
  - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
  - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
  - Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
  - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
  - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
  - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan
  - Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
  - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
  - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
- Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan,

Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

5. Program Perizinan Pertanian

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
  - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
  - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
  - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kowanan, meliputi sub kegiatan:
  - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
  - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang harus dijabarkan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya. Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 134.567.158.000,- Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD tahun 2025, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2025, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2025. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2025 pada table 19

Table 19 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Rencana Kerja 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					134,567,158,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur			92,153,979,000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					117,333,677,686	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			80,274,926,984
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	95,17		42,397,366,433	Indeks Layanan Kesekretarian	Score	96.88	32,059,951,134
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100.00			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	92.00		1,781,554,677	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	94.00	1,914,623,677
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	Provinsi Kalimantan Timur	548,090,512	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	670,118,286
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	30,638,800	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	95,731,184
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	12,083,264	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	95,731,184
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	101,397,391	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	382,924,736

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,089,344,710	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	670,118,287
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91.00</b>		<b>32,982,245,841</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>92.00</b>	<b>24,018,531,686</b>
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182	Provinsi Kalimantan Timur	31,965,778,615	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	22,486,832,743
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Timur	720,783,625	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	765,849,471
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Provinsi Kalimantan Timur	7,709,856	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	95,731,184
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	11,964,952	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	95,731,184
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	252,742,919	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	430,790,328
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	23,265,874	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	143,596,776

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>		<b>143,599,900</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>86.00</b>	<b>478,655,920</b>
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	10,477,000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	95,731,184
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Provinsi Kalimantan Timur	80,405,900	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	95,731,184
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur	52,717,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	287,193,552
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83.00</b>		<b>668,142,443</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>86.00</b>	<b>622,252,696</b>
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	Provinsi Kalimantan Timur	268,939,656	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	95,731,184
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur	15,680,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	95,731,184
3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	Provinsi Kalimantan Timur	136,100,723	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	143,596,776
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	Provinsi Kalimantan Timur	247,422,064	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	287,193,552

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83.00</b>		<b>1,238,499,345</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>86.00</b>	<b>1,627,430,127</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Provinsi Kalimantan Timur	31,134,806	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	47,865,592
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	Provinsi Kalimantan Timur	217,162,113	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	382,924,736
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	Provinsi Kalimantan Timur	130,350,426	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	95,731,184
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	17	Provinsi Kalimantan Timur	33,252,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	47,865,592
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	826,600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,053,043,023
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83.00</b>		<b>1,894,439,236</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>86.00</b>	<b>478,655,919</b>
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	Provinsi Kalimantan Timur	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	382,924,736

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	78	Provinsi Kalimantan Timur	1,894,439,236	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	95,731,183
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>1,690,132,036</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>86.00</b>	<b>1,723,161,310</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur	16,668,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	95,731,184
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur	435,259,180	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	478,655,919
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur	1,238,204,856	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,148,774,207
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83.00</b>		<b>1,998,752,955</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>86.00</b>	<b>1,196,639,799</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	Provinsi Kalimantan Timur	319,453,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	49	201,035,486
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168	Provinsi Kalimantan Timur	125,061,150	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	430,790,328

Rancangan Rencana Kerja 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	Provinsi Kalimantan Timur	23,024,400	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	181,889,249
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	7	Provinsi Kalimantan Timur	1,531,214,005	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	382,924,736
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88.00		40,770,488,609	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87.46	25,994,160,891
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97,29		2,995,563,353	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97.30	3,493,838,830
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27		1,838,561,446	Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	29.00	2,445,687,181
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410,000			Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	435,000	
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62			Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	58.20	
		Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660		Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	725		
		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	920		1,157,001,907	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	970	1,048,151,649
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,838,561,446	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4.00	2,445,687,181

Rancangan Rencana Kerja 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	3	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,157,001,907	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1.00	1,048,151,649
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	61,5		1,881,588,247	Persentase Calving Rate	%	62	6,540,466,289
		Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13			Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13.5	
		Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225			Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	280	
		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85		1,361,575,105	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1.75	2,767,120,353
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	61,50			Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	72	
		Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	119			Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	130	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,881,588,247	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	6,540,466,289
3.27.02.1.04.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,361,575,105	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	2,767,120,353

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>		<b>2,751,279,055</b>	<b>Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan</b>	<b>Unit</b>	<b>31</b>	<b>3,270,233,144</b>
		<b>Luasan HPT</b>	<b>Ha</b>	<b>1225</b>		<b>1,960,615,869</b>	<b>Luasan HPT</b>	<b>Ha</b>	<b>1225</b>	<b>3,773,345,936</b>
3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,751,279,055	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	3,270,233,144
3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,960,615,869	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	1	3,773,345,936
<b>3.27.02.1.06</b>	<b>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</b>	<b>Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman</b>	<b>%</b>	<b>47</b>		<b>743,219,568</b>	<b>Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>838,521,319</b>
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	743,219,568	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	838,521,319
<b>3.27.02.1.07</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>	<b>Jumlah Pengadaan Ternak</b>	<b>(Indukan/Bibit)</b>	<b>4700</b>		<b>32,072,210,765</b>	<b>Jumlah Pengadaan Ternak</b>	<b>(Indukan/Bibit)</b>	<b>7200</b>	<b>8,804,473,850</b>

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02.1.07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	3773	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	32,072,210,765	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	1100	8,804,473,850
3.27.03	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,72</b>		<b>15,727,562,222</b>	<b>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99.80</b>	<b>1,397,535,532</b>
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	147		15,727,562,222	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	158	1,397,535,532
		Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	120			Jumlah Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	133	
		Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	4			Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	5	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	15,727,562,222	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1,397,535,532
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41		8,534,628,899	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92.45	7,546,691,873
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81		3,394,173,640	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	97.75	4,192,606,597
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68		2,762,979,781	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	72	2,096,303,298
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80		3,230,451,920	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	83	2,515,563,957

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Persentase pelayanan kesehatan hewan</b>	%	<b>45,8</b>			<b>Persentase pelayanan kesehatan hewan</b>	%	<b>49</b>	
		<b>Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis</b>	%	<b>22,5</b>		<b>416,932,732</b>	<b>Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis</b>	%	<b>26</b>	<b>628,890,988</b>
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	2,176,928,353	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	1,362,597,143
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	586,051,428	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	40	733,706,155
3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	3,230,451,920	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	2,515,563,957
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	416,932,732	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	628,890,988
3.27.04.1.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan</b>	%	<b>80</b>		<b>1,472,267,649</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan</b>	%	<b>88</b>	<b>1,677,042,639</b>
		<b>Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ</b>	%	<b>2,85</b>		<b>340,196,845</b>	<b>Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ</b>	%	<b>2.4</b>	<b>419,260,660</b>

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	Laporan	12	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,472,267,649	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	Laporan	12	1,677,042,639
3.27.04.1.02.05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	340,196,845	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2	419,260,660
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<b>Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ</b>	<b>Unit</b>	<b>36</b>		<b>728,732,704</b>	<b>Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ</b>	<b>Unit</b>	<b>47</b>	<b>838,521,319</b>
		<b>Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)</b>	<b>%</b>	<b>86</b>		<b>1,314,245,400</b>	<b>Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)</b>	<b>%</b>	<b>91</b>	<b>1,467,412,310</b>
		<b>Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan</b>	<b>%</b>	<b>1,41</b>		<b>314,665,683</b>	<b>Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan</b>	<b>%</b>	<b>1.5</b>	<b>209,630,331</b>
		<b>Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif</b>	<b>%</b>	<b>23,5</b>		<b>798,833,532</b>	<b>Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif</b>	<b>%</b>	<b>22</b>	<b>1,048,151,649</b>
		<b>Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting</b>	<b>Gram/hari</b>	<b>30,5</b>		<b>283,417,693</b>	<b>Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting</b>	<b>Gram/hari</b>	<b>33.6</b>	<b>209,630,330</b>
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	728,732,704	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	11	838,521,319

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	418,226,300	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	807,076,773
3.27.04.1.03.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	9	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	314,665,683	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	7	209,630,331
3.27.04.1.03.05	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	10	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	896,019,100	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	10	660,335,537
3.27.04.1.03.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	798,833,532	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	35	1,048,151,649
3.27.04.1.03.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	umlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	283,417,693	umlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	100	209,630,330
<b>3.27.04.1.04</b>	<b>Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan</b>	<b>%</b>	<b>60</b>		<b>266,078,600</b>	<b>Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>628,890,989</b>

	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.04.1 .04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	60	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	266,078,600	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	70	628,890,989
<b>3.27.06</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,59</b>		<b>259,872,040</b>	<b>Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99.73</b>	<b>698,767,766</b>
3.27.06. 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice</b>	%	65,8		123,303,460	<b>Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice</b>	%	100.00	559,014,213
		<b>Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan</b>	Unit	126		136,568,580	<b>Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan</b>	Unit	139	139,753,553
3.27.06.1 .01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	123,303,460	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1200	559,014,213
3.27.06.1 .01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	136,568,580	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	139,753,553
<b>3.27.07</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99,73</b>		<b>3,254,022,490</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan</b>	<b>Skor</b>	<b>99.78</b>	<b>4,891,374,361</b>
<b>3.27.07. 1.02</b>	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Rasio SD komoditas/ produk peternakan</b>	<b>rasio</b>	<b>1146</b>		<b>280,980,382</b>	<b>Rasio SD komoditas/ produk peternakan</b>	<b>rasio</b>	<b>1.139</b>	<b>489,137,436</b>

Rancangan Rencana Kerja 2025							Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Jumlah peternak millenial</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>		<b>333,195,496</b>	<b>Jumlah peternak millenial</b>	<b>Orang</b>	<b>125</b>	<b>1,467,412,308</b>
		<b>Jumlah pembudidaya unggas</b>	<b>RTUP</b>	<b>49310</b>			<b>Jumlah pembudidaya unggas</b>	<b>RTUP</b>	<b>49530</b>	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	280,980,382	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3	489,137,436
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	333,195,496	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	25	1,467,412,308
<b>3.27.07.1.03</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>Jumlah Desa Korporasi Ternak</b>	<b>Unit</b>	<b>13</b>		<b>2,639,846,612</b>	<b>Jumlah Desa Korporasi Ternak</b>	<b>Unit</b>	<b>11</b>	<b>2,934,824,617</b>
3.27.07.1.03.05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	1,956,093,952	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	33	1,956,549,745
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	13	Provinsi Kalimantan Timur & Luar Daerah	683,752,660	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	11	978,274,872
<b>02.02</b>	<b>UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>					<b>11,567,368,092</b>	<b>UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>			<b>6,987,677,656</b>
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>95,17</b>		<b>8,663,528,153</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>96.88</b>	<b>3,284,208,497</b>

	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	%	<b>100</b>			<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	%	<b>100</b>	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91</b>		<b>147,070,380</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>92</b>	<b>262,736,679</b>
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Penjaja m Paser utara	145,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	213,473,552
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Penjaja m Paser utara	1,870,380	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	49,263,127
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>50,879,625</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>86</b>	<b>328,420,850</b>
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Penjaja m Paser utara	1,870,380	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	65,684,170
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Penjaja m Paser utara	43,248,865	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	131,368,340
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Penjaja m Paser utara	5,760,380	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	131,368,340
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>112,972,300</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>86</b>	<b>492,631,275</b>
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	Penjaja m Paser utara	49,300,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	328,420,850

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	Penajam Paser utara & Luar Daerah	63,672,300	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	164,210,425
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>		<b>383,431,644</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>86</b>	<b>656,841,700</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	Penajam Paser utara	20,338,395	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	65,684,170
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Penajam Paser utara	25,660,679	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	98,526,255
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Penajam Paser utara	24,232,570	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	65,684,170
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	-	Penajam Paser utara	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	65,684,170
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Penajam Paser utara & Luar Daerah	313,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	361,262,935
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>		<b>162,038,546</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>86</b>	<b>394,105,019</b>
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	Penajam Paser utara	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	197,052,510

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	Penajam Paser utara	162,038,546	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	197,052,509
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>958,989,200</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>86</b>	<b>656,841,700</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	ppu	14,780,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	65,684,170
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	154,132,800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	262,736,680
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	790,076,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	328,420,850
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>6,848,146,458</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>86</b>	<b>492,631,274</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	ppu	141,945,500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	65,684,170
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64	ppu	168,735,200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	213,473,552
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	ppu	6,537,465,758	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	213,473,552

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	98,73		2,903,839,939	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	99.00	3,703,469,159
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	194		1,420,271,920	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	204.5	740,693,832
		angka kelahiran	%	26,1			angka kelahiran	%	27.00	370,346,916
		Calving Interval	Bulan	16,66			Calving Interval	Bulan	16.3	185,173,458
		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	5.00			Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0.1	370,346,915
		Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,05		1,483,568,019	Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	1.97	370,346,916
		Jumlah produksi pupuk	Ton	20			Jumlah produksi pupuk	Ton	25	185,173,458
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols/kg)	15,000			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols/kg)	20,000	185,173,458
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1,800			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1,850	925,867,290
		Jumlah PAD	Rupiah	120,000,000			Jumlah PAD	Rupiah	127,000,000	370,346,916
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	ppu	1,420,271,920	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	2,036,908,037
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	ppu	1,483,568,019	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	1,666,561,122

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>02.03</b>	<b>UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>					<b>5,666,112,222</b>	<b>UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>4,891,374,360</b>
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>95,17</b>		<b>3,595,239,736</b>	<b>Indeks Layanan Kesekretarian</b>	<b>Score</b>	<b>96.88</b>	<b>2,934,824,616</b>
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>91</b>		<b>124,791,000</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</b>	<b>Score</b>	<b>92</b>	<b>234,785,969</b>
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	118,920,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	190,763,600
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	5,871,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	44,022,369
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>31,954,300</b>	<b>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</b>	<b>Score</b>	<b>86</b>	<b>293,482,462</b>
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	5,301,140	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	58,696,492
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	15,531,140	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	117,392,985
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	smd	11,122,020	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	117,392,985
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>83</b>		<b>109,737,000</b>	<b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>Score</b>	<b>86</b>	<b>440,223,693</b>

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	smd	37,737,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	146,741,231
3.27.01.1 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	smd, bpn, luarpro v	72,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	293,482,462
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>83</b>		<b>299,090,881</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</b>	%	<b>86</b>	<b>528,268,431</b>
3.27.01.1 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	smd	10,344,647	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	58,696,492
3.27.01.1 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	smd	36,754,568	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	88,044,739
3.27.01.1 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	smd	33,171,666	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	58,696,492
3.27.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	smd	3,960,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	12	58,696,492
3.27.01.1 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	214,860,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	264,134,216
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>83</b>		<b>1,993,167,358</b>	<b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	%	<b>86</b>	<b>352,178,954</b>

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	smd	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	5	176,089,477
3.27.01.1 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-
3.27.01.1 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	smd	1,993,167,358	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	176,089,477
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>704,867,700</b>	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>86</b>	<b>586,964,923</b>
3.27.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	17,356,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	58,696,492
3.27.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	196,454,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	234,785,969
3.27.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	491,057,700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	293,482,462
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>83</b>		<b>331,631,497</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>86</b>	<b>498,920,184</b>
3.27.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	smd	101,120,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	58,696,492

Kode	Rancangan Rencana Kerja 2025						Perkiraan Maju Tahun 2026			
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	smd	160,631,497	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	77	190,763,600
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	smd	46,900,000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	58,696,492
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	smd	22,980,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	190,763,600
<b>3.27.04</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Skor</b>	<b>99,18</b>		<b>2,070,872,486</b>	<b>Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Skor</b>	<b>99.44</b>	<b>1,956,549,744</b>
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	45		763,330,000	Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	50	684,792,410
		Nilai Kepuasan pelanggan	Score	86		872,378,000	Nilai Kepuasan pelanggan	Score	88.31	782,619,898
		Jumlah PAD	Rupiah	212,000,000		545,236,000	Jumlah PAD	Rupiah	235,000,000	489,137,436
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	Provinsi Kalimantan Timur	2,070,872,486	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	600	1,956,549,744

## BAB IV

### P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, sebagai upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja. Kemudian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

# LAMPIRAN







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228  
Samarinda 75121

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 500.7/56/DPKH-I

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025  
PEMBANGUNAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a) bahwa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) agar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2025 dapat tersusun, maka perlu ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja;
- c) bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim penyusunan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Memperhatikan : DPA-SKPD Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 3-27.0-00.0-00.02.01 tanggal 29 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;

Kedua : Tugas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 adalah mengkompilasi dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Timur, Rencana Strategis Pembangunan Kalimantan Timur, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Nasional, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaran Kerja Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 19 Juli 2024



Kepala Dinas,

  
Fanni Himawan, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741216 200604 1 006

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 500.7/56/DPKH-I

Tanggal : 19 Juli 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	<u>Fahmi Himawan, S.T., M.T</u> NIP. 19741216 200604 1 006	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggung Jawab
2.	<u>Fadli S, S.Sos.M.Si</u> NIP. 19741207 199403 1 003	Sekretaris	Ketua
3.	<u>H. Rofik, S.Pt</u> NIP. 19791017 200903 1 002	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	<u>Delsi Isyawati, SE</u> NIP. 19751225 200701 2 016	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	<u>Meliana, SE</u> NIP. 19810525 200901 2 001	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	<u>Isa Prahertino, S.Pt</u> PPBASN	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
7.	<u>Hendy Darmawan, S.Pt</u> PPBASN	Penyusun Data Perencanaan	Anggota
8.	<u>Yogi Gunara Ryana, SE</u> PPBASN	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
9.	<u>Nisa Nur Istiqomah, S.Pt</u> PPBASN	Petugas Data Evaluasi Kinerja	Anggota
10.	<u>M. Granit Ady Wirasisya, M.H.I</u> PPBASN	Petugas Perencanaan	Anggota
11.	<u>Nurul Khairia, S.Hut</u> PPBASN	Petugas Analisis Rencana Strategis	Anggota
12.	<u>Rival Rinaldi, S.Sta</u> PPBASN	Pengelola Data Statistik Peternakan	Anggota



Kepala,

Fahmi Himawan, S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19741216 200604 1 006

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009